

MAMPU KITA

KABAR DARI KITA



KABAR DWIBULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI 16/JUL - SEP 2020

Konferensi Perempuan Timur Lahirkan Rekomendasi untuk Penghentian Kekerasan terhadap Perempuan

“Indonesia bagian timur sangat kaya dengan berbagai sumberdaya, budaya, dan adat. Kekayaan dan potensi dari Indonesia timur harus diimbangi dengan perempuan-perempuan yang berdaya. Dengan adanya kolaborasi dari pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun media, saya yakin kita bisa memberdayakan perempuan dan mendorong perempuan pelaku usaha untuk terus berinovasi serta melindungi perempuan baik dari stigmatisasi maupun stereotip yang merugikan perempuan” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si, pada pidato pembukaan Konferensi Perempuan Timur 2020 (KPT2020), 26 Agustus 2020.

KPT2020 yang diselenggarakan pada 26-27 Agustus 2020 ini merupakan inisiasi dari Yayasan BaKTI, Forum Pengada Layanan (FPL), dan Komnas Perempuan dengan dukungan penuh dari Program MAMPU, Program Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan mengangkat tema “Memetik Buah dari Sinergi Multipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di Kawasan Timur Indonesia,” konferensi ini dimaksudkan untuk berbagi aksi kolektif dan model pemberdayaan gerakan perempuan di Indonesia Timur untuk pembangunan berkelanjutan.



I Gusti Ayu Bintang melanjutkan, “Saya berharap konferensi ini dapat menghasilkan gagasan, pemikiran dan solusi yang inovatif agar tercipta semangat dan optimisme sehingga semakin banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang lahir dari kawasan Indonesia timur. Saya yakin potensi perempuan Indonesia timur adalah kekuatan bagi pembangunan bangsa, menuju perempuan berdaya, Indonesia maju,” lanjutnya.

Sepanjang acara, para peserta KPT2020 saling berbagi dan belajar mengenai beragam permasalahan terkait isu kekerasan terhadap perempuan, praktik baik dan sinergi multipihak, yang sedang atau sudah dilakukan di tingkat daerah hingga nasional melalui beberapa topik selama dua hari. Pembahasan berbagai topik tersebut dirangkum dan disusun sebagai rekomendasi KPT2020. Di akhir kegiatan, KPT2020 berhasil melahirkan 11 rekomendasi yang akan ditindaklanjuti beragam pihak, terutama Pemerintah Indonesia, agar isu ketimpangan pembangunan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dapat dihapuskan di wilayah timur Indonesia.

“Rekomendasi ini lahir dari pengalaman dan tantangan yang dialami berbagai pihak yang sudah melakukan inisiatif baik guna mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan di wilayah timur Indonesia,” jelas Lusya Palulungan – Ketua Panitia Bersama KPT2020. “Gagasan multi pihak ini kami rangkum menjadi



rekomendasi yang kami berikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti agar inisiatif tersebut dapat direplikasi di wilayah lain,” lanjutnya.

Rekomendasi KPT2020 diserahkan Panitia KPT2020 secara simbolis kepada Komnas Perempuan yang diterima oleh Veryanto Sitohang (Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024) untuk diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dan Kementerian Dalam Negeri untuk terus membangun sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, media, perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya yang memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Poin-poin rekomendasi KPT2020 dapat diakses di <https://bit.ly/MateriKPT20>



Webinar MAMPU Membahas Perempuan di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali perempuan dan anak perempuan. Bahkan, mereka lebih rentan dari kelompok lainnya. Melalui Webinar Series MAMPU “Perempuan dan Pandemi”, cerita-cerita mengenai dampak pandemi terhadap perempuan dan perjuangan mereka dalam mengatasi dampak pandemi diungkap dan didiskusikan dalam tiga sesi webinar yakni pada 16, 23, 30 Juli 2020 lalu.

Dalam sambutannya, Kate Shanahan, Team Leader Program MAMPU menyatakan keinginannya agar webinar ini dapat menjadi wadah bagi perempuan di akar rumput dan lembaga non-pemerintah untuk berbagi perspektif dan pengalaman mereka terkait pandemi. Dan pengalaman mereka dapat langsung didengar oleh para pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kate Shanahan juga menambahkan, “MAMPU bersama mitranya selama pandemi terus melakukan kegiatan intervensi di lapangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan perspektif gender dan inklusif. Mitra MAMPU menguatkan pengorganisasian kelompok perempuan di desa, membangun ketahanan di komunitas dan melibatkan multi pihak dalam penanganan Covid-19.”

Seri webinar pertama dengan topik “Beban Ganda Perempuan Pekerja di Masa Pandemi” menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 telah berdampak secara signifikan terhadap pekerjaan dan pendapatan di sektor-sektor dimana partisipasi pekerja perempuan tinggi, seperti sektor jasa, UKM, dan pekerja informal. Perempuan yang bekerja di sektor informal seperti misalnya pekerja rumahan, merupakan salah satu yang paling terdampak. “Sebanyak 511 pekerja rumahan dampingan TURC atau 68,42% terkena dampak dan kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi karena akses dan pengetahuan terhadap gadget terbatas, pekerja rumahan tidak bisa mengakses kartu pra kerja karena harus dilakukan secara online,” tutur Dede Rina, Koordinator Informal Workers Division, TURC (Trade Union Rights Center), mitra MAMPU dalam meningkatkan kondisi kerja yang baik terhadap pekerja rumahan.

“Dalam mendorong pemulihan ekonomi pekerja rumahan, kami melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi pencegahan COVID-19, pemetaan potensi ekonomi, melatih urban farming, mendorong kooperasi sebagai daya ungkit perekonomian, serta memfasilitasi pekerja rumahan dalam mengakses program pemerintah,” lanjutnya.

Selain itu, dibahas pula beberapa upaya yang dilakukan pemerintah di mana mitra MAMPU bekerja dalam mendampingi perempuan akar rumput di wilayahnya. Ety Subiyarti, Kades Rogojati Wonosobo misalnya, menceritakan tentang hal yang ia lakukan bersama dengan kelompok DESBUMI di desanya menuturkan, “Sebelum ada pandemi, kelompok usaha yang dijalankan oleh DESBUMI seperti penjahit, pembatik dan tata boga, sudah berjalan dengan lancar. Namun ketika mulai pandemi, usaha mereka nyaris berhenti karena tidak ada orderan. Syukurlah kelompok penjahit mendapatkan program Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) untuk membuat masker dan dijual. Produk mereka kami beli dan bagikan kepada warga.”

Pada webinar kedua yang berjudul “Optimalisasi Peran Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Sosial & Layanan Dasar bagi Kelompok Rentan di Masa Pandemi” webinar menghadirkan Bappenas RI yang diwakili oleh Maliki, Direktur Penanganan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Kemensos yang diwakili oleh Said Mirza Pahlevi, Kepala Pusat Data dan Informasi. Pada paparannya, Said Mirza mengatakan pentingnya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menangani dampak COVID-19. Perbaikan DTKS ini menjadi penting dalam penyaluran bantuan sosial, seperti sembako dan bantuan langsung tunai, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas,

Terkait dengan penyediaan layanan bagi kelompok rentan, Nani Zulminarni, Direktur Yayasan Pekka, yang juga merupakan mitra MAMPU, menyatakan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki DTKS yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, “Ada inovasi yang sudah terjadi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki DTKS. Di 94% desa yang kami survei, aparat desanya melakukan verifikasi dan validasi data di Musyawarah Desa (Musdes) sehingga data dapat diperbaiki. Kami juga menemukan, bahwa 32% aparat desa mengatakan bahwa mereka melibatkan perempuan miskin dalam Musdesnya sehingga suara perempuan lansia dan penyandang disabilitas dapat terwakili.”

Pada webinar seri terakhir yang diselenggarakan pada 30 Juli 2020 yang bertajuk “Dampak COVID-19 terhadap Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan”, acara dibuka dengan sambutan kunci dari Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur KPAPD, Bappenas. Dalam paparannya, Woro Srihastuti memberikan gambaran besar pengaruh Covid-19 terhadap perempuan dan tanggapan pemerintah untuk memastikan perekonomian negara terus berjalan dalam situasi new normal. “Pemerintah Indonesia telah memfokuskan keterpaduan elemen strategi dalam RPJMN



dalam menurunkan kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini akan mengubah aspek kehidupan kita termasuk kebijakan pembangunan yang harus adaptif merespon berbagai tantangan perubahan tersebut.” Pada kesempatan yang sama, Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan memaparkan hasil penelitian Komnas Perempuan tentang Dinamika Perubahan Rumah Tangga selama Masa Covid-19, yang melibatkan 2.285 responden. “66% responden melaporkan beban pekerjaan rumah tangga yang lebih besar karena mayoritas ditanggung oleh perempuan. Menurut catatan kami, yang paling terdampak adalah perempuan dengan kelompok usia 31-40 tahun dan berpenghasilan kurang dari lima juta, dan yang bekerja di sektor informal.”

Woro Srihastuti menutup diskusi webinar dengan menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menekan angka kekerasan, karena fenomena ini tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri. “Kita bisa lakukan kolaborasi pemerintah pusat, pemda, NGO, dan akademisi untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Data menjadi dasar kita untuk bergerak dan penguatan data menjadi penting”, pungkasnya.



MAMPU Dukung Bappenas dan KPPPA Bersinergi & Berkolaborasi dengan Pemda dan OMS untuk Pencegahan Perkawinan Anak

Jakarta, 2 September 2020 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didukung oleh Program MAMPU, mengadakan konferensi nasional bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak” pada 2 September 2020. Konferensi yang diselenggarakan secara daring ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) kepada pemerintah daerah dan jaringan organisasi masyarakat sipil.

di usia anak,” jelas Woro. “Perkawinan anak juga meningkatkan risiko bayi meninggal dalam kurun waktu 12 bulan, dan mengalami stunting jika mereka bertahan hidup,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, hadir Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, KPPPA, Rohika Kurniadi Sari yang menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan di tingkat nasional dan perlu didukung dengan rencana aksi di daerah masing-masing. Sebagai koordinator teknis pelaksanaan Stranas PPA, Kemen PPPA akan memperkuat sinerginya dengan Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak. “Kita perlu mendorong keikutsertaan berbagai pihak, terutama dari Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga/PUSPAGA, Sekolah Ramah Anak, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya perkawinan anak” ujarnya.

Pembukaan konferensi dihadiri Aedan Whyatt – Counsellor (Kemiskinan dan Pembangunan Sosial), Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia dan Subandi Sardjoko – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas. Subandi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan institusi pemerintah dan non pemerintah dalam menjamin keberhasilan upaya penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

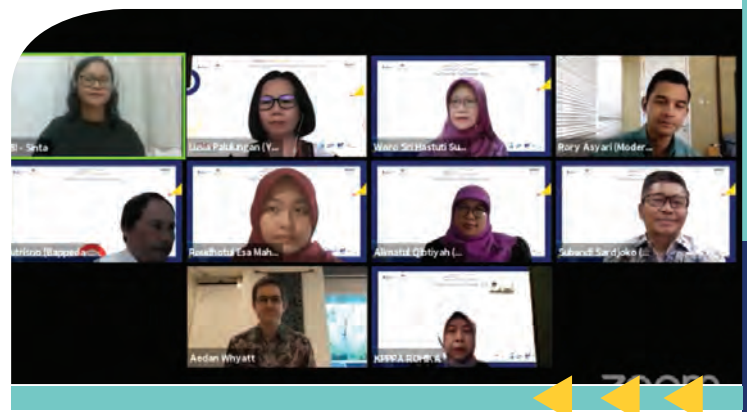
Konferensi ini juga mengundang narasumber dari berbagai daerah yakni Dinas PPPA tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda Jawa Barat, tokoh agama dan masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil (CSO) mitra MAMPU yang mewakili masyarakat di tingkat akar rumput, seperti: Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Kesehatan Perempuan, Yayasan BaKTI, dan Muhammadiyah. Selama ini, CSO tersebut secara aktif bekerja untuk pencegahan perkawinan anak bersama Program MAMPU di 700 desa yang tersebar di 90 kabupaten/kota dari 27 provinsi di Indonesia.

Sesi pertama konferensi dibuka oleh Woro Srihastuti Sulistyningrum – Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, BAPPENAS, yang menyampaikan tentang masih tingginya perkawinan anak di Indonesia, yaitu sebesar 10,82% (2019). Angka ini diproyeksikan menurun menjadi 8,74% di tahun 2024 (RPJMN 2020-2024) dan 6,94% di tahun 2030 (SGDs Goal 5). Sebab itu, masih dibutuhkan kerja keras kolektif untuk memastikan dicapainya sasaran tersebut.

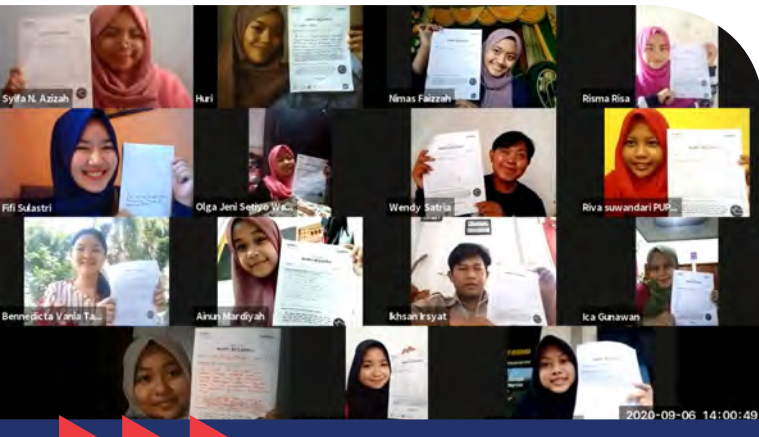


Sesi ini juga mendiskusikan temuan penelitian yang dilakukan oleh Program MAMPU bersama University of Melbourne tahun 2020, yang menunjukkan bahwa perkawinan anak berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak perempuan dan laki-laki korban perkawinan anak.

“Salah satu temuan penelitian menunjukkan bahwa anak yang menunda usia perkawinannya, memiliki peluang untuk berpartisipasi 1,6 -1,8 tahun lebih lama dalam pendidikan dan memiliki upah 20-25 persen lebih tinggi dibandingkan jika menikah



MAMPU Ajak Anak Indonesia untuk #MampuBeraniBersikap



Menyambut semangat yang sama, MAMPU melibatkan 15 anak muda untuk menyuarakan aspirasi mereka di 10 kabupaten/kota melalui kampanye digital yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, mulai pekan terakhir bulan Agustus hingga September 2020.

Kegiatan ini didukung oleh 6 organisasi mitra MAMPU untuk agenda cegah kawin anak, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan BaKTI, Yayasan PEKKA, PERMAMPU, dan Yayasan PUPA.

Kampanye ini diberi judul "Mampu Berani Bersikap" dan dapat diakses di platform media sosial Facebook (MAMPU Berani Bersikap) dan Instagram (@mampu.berani.bersikap).

PEKKA Pantau Bantuan Sosial kepada Perempuan di Masa Pandemi COVID-19

Yayasan PEKKA menyampaikan hasil survei pemantauan berbagai bantuan sosial COVID-19 dalam webinar "Feminisasi Kemiskinan dan Efektifitas Bantuan Sosial Merespon Pandemi COVID-19" yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 24 Agustus 2020 pkl.13.00-15.00.

Sepanjang 21 Mei - 3 Juni 2020, Yayasan PEKKA telah memfasilitasi Serikat Pekka di **17 Propinsi** dan **42 Kabupaten, 69 Kecamatan**, dan **90 Desa** untuk melakukan pemantauan berbagai bantuan sosial pemerintah yang diberikan selama masa pandemi COVID-19. Pemantauan ini dilakukan dengan dukungan Program MAMPU, KOMPAK dan WVL-GAC.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara kunci dalam Webinar ini. Beliau menyampaikan komitmen Kemendes PDTT untuk menempatkan perempuan pada posisi untuk terlibat dalam proses pembangunan desa.

"Kami sudah memberikan tekanan bahwa setiap musdes harus ada unsur perempuan yang mewakili minimal 30 persen dari

Serangkaian kegiatan seperti Kelas Instagram Live Akademi Mimpi, Kelas WhatsApp Group (ditujukan bagi orang tua), Sesi Curhat Live di Instagram, Lomba Menulis, serta workshop Kelas Berani Usaha membuat masker.

Deklarasi Mimpi menjadi puncak dari acara kampanye ini. Diiiikuti oleh 15 champion muda yang dilakukan di 9 provinsi terpilih, dimana mereka menyatakan tekad untuk memperjuangkan cita-cita mereka dan menolak perkawinan anak.

Kate Shanahan, Team Leader MAMPU turut menyampaikan dukungan MAMPU terhadap kampanye digital ini. "Keberlanjutan masa depan Indonesia terletak pada anak-anak Indonesia. Dengan fakta masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, sudah seharusnya ini menjadi perhatian kita bersama," ungkapnya.

Organisasi Masyarakat Sipil dan jaringan yang terlibat dalam kampanye ini juga sudah sejak awal terlibat dalam upaya advokasi perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana batas usia kawin bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun. "Program MAMPU bersama mitra pelaksana telah terlibat dan mendukung upaya pencegahan perkawinan anak termasuk mendorong perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan dengan menaikkan batas minimal usia kawin pada tahun 2019 lalu."



total peserta musdes. Kita akan pantau setiap saat agar kebijakan ini jangan sekadar menjadi hiasan bibir, tetapi betul-betul dilaksanakan," ujar Menteri Abdul Halim Iskandar. Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam sambutannya mengatakan, di bulan ke-enam Pandemi Covid-19, ada isu menarik terkait bantuan yang diberikan oleh Pemertinah kepada masyarakat sasaran yang bisa dilihat dari hasil pemantauan Yayasan PEKKA. "Isu yang diusung PEKKA ini sangat menarik karena memang perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat desa dan memiliki peran yang signifikan untuk desa."

Selama periode waktu 21 Mei - 3 Juni 2020 sebanyak **123 kader** Yayasan PEKKA sudah terlatih melakukan sensus di **90 Desa** dan **90 Rukun Tetangga (RT)/ Dusun** terhadap **6.559 Kepala Keluarga**. Selain itu, sudah dilakukan wawancara dengan 87 Aparat Desa untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan bantuan sosial oleh Pemerintah Desa.

"Pemantauan bertujuan untuk memastikan masyarakat miskin khususnya perempuan kepala keluarga (Pekka) dan kelompok

marjinal lainnya, mendapatkan hak perlindungan selama pandemi COVID-19 dan mampu meneruskan kehidupan mereka paska pandemi,” ungkap Nani Zulminarni, Direktur Yayasan PEKKA.

Temuan penting dari pemantauan program bantuan sosial, dari perspektif masyarakat dan desa, yang dilakukan Yayasan PEKKA ini adalah adanya kesalahan inklusi, eksklusif serta potensi korupsi dalam pemberian bantuan sosial maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Berdasarkan hasil

pemantauan ini, Yayasan PEKKA dan Federasi Serikat Pekka di seluruh wilayah Indonesia memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan desa untuk melakukan perluasan program bantuan sosial khususnya untuk pemulihan ekonomi, memperkuat basis data dengan mengembangkan sistem data berbasis komunitas dan terpilah, serta mengembangkan kebijakan afirmasi untuk menjangkau kelompok-kelompok miskin yang khusus dan tereksklusif.



'Aisyiyah Gelar Jambore Kader, Perkuat Peran Perempuan untuk Perubahan Sosial

"Kader 'Aisyiyah memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, tentang isu kesehatan reproduksi dan nutrisi selama pandemi, memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat." Hal tersebut disampaikan oleh Kate Shanahan selaku Team Leader Program MAMPU dalam kegiatan Jambore Kader Nasional 'Aisyiyah pada Kamis (16/7).

Acara Jambore Kader Nasional 'Aisyiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dalam kemitraan Program MAMPU, mengambil tema "Kepemimpinan di Komunitas Sebagai Agen Perubahan: Belajar dari Pengalaman Perempuan". Diikuti oleh 500 kader dari 15 kabupaten/kota dan 6 provinsi, dan dilakukan secara daring, Jambore Kader 'Aisyiyah bertujuan memfasilitasi kader perempuan dalam berbagi pengalaman dan praktik baik untuk penguatan strategi pemberdayaan serta advokasi terkait isu kesehatan reproduksi dan gizi perempuan.

Kate Shanahan, Team Leader MAMPU yang turut membuka Jambore menyatakan, "Peran 'Aisyiyah sebagai mitra MAMPU di akar rumput sangat penting untuk memastikan perubahan perilaku yang positif terjadi di masyarakat. Situasi pandemi Covid-19 telah membawa dampak sosial kesehatan dan ekonomi yang serius di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan lainnya akan semakin lebar karena pandemi ini. Mitra MAMPU menguatkan pengorganisasian kelompok perempuan di desa, membangun ketahanan di komunitas, dan melibatkan multi pihak dalam penanganan Covid-19."

Tri Hastuti Nur selaku Sekretaris Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang juga merupakan Koordinator Program MAMPU 'Aisyiyah menyampaikan bahwa 'Aisyiyah melalui kader-kadernya telah memiliki banyak pengalaman dalam melahirkan kebijakan yang berperspektif gender dan memperhatikan kepentingan perempuan termasuk di masa pandemi ini.

"Beberapa pengalaman baik 'Aisyiyah melahirkan peraturan desa dan mengatasi perkawinan anak menjadi isu yang sangat

penting sekali, kemudian isu-isu kesehatan reproduksi yang saya kira sampai saat ini belum menjadi perhatian bagi banyak pihak di mana 'Aisyiyah ikut mendorong bagaimana isu kesehatan reproduksi dan isu stunting menjadi perhatian."

Siti Noordjannah Djohantini, Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang juga turut hadir menyampaikan apresiasinya atas kerja para pimpinan dan kader yang bersentuhan langsung dengan akar rumput. "Para perempuan kader 'Aisyiyah itu memiliki semangat yang luar biasa untuk berkomunikasi mengajak dan berikhtiar agar seluruh perempuan memperoleh hak-haknya dan mendapatkan pengetahuan penting. Keberhasilan para kader ini bukan hanya mengajak para perempuan lain tetapi juga dapat memberikan pengetahuan kepada para laki-laki sehingga dapat menimbulkan perubahan."

Kekuatan para perempuan merupakan akar dari kekuatan 'Aisyiyah, dimana sejak awal berdirinya 'Aisyiyah juga digerakkan oleh kekuatan para perempuan. Termasuk selama bermitra dengan Program MAMPU yang memiliki fokus meningkatkan akses perempuan terhadap layanan dan perlindungan dari pemerintah dengan membangun kapasitas serta menguatkan suara dan pengaruh perempuan hingga mencapai kemampuan melakukan advokasi baik secara vertikal dengan pihak pembuat kebijakan, maupun secara horizontal kepada masyarakat luas, seperti yang telah diterapkan oleh 'Aisyiyah bersama para kader.



Festival Kepemimpinan Perempuan: KAPAL Perempuan Rayakan Perjalanan Program Gender Watch

Institut KAPAL Perempuan menyelenggarakan Festival Kepemimpinan Perempuan secara daring pada 28-29 Agustus 2020 untuk merayakan perjalanan Program Gender Watch yang telah berjalan sejak Oktober 2013 hingga Agustus 2020. Program Gender Watch inisiatif dari KAPAL Perempuan adalah model pemantauan program perlindungan sosial yang terintegrasi dengan penyadaran kritis dan pemberdayaan perempuan.

Program ini adalah bagian dari Program MAMPU, dikembangkan di sejumlah desa terpencil kepulauan dan pegunungan di NTT, NTB, Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. KAPAL Perempuan bekerjasama dengan organisasi di lokasi program untuk menjalankan Gender Watch yaitu LPSDM, YKPM, KPS2K, YAO (digantikan oleh Pondok PERGERAKAN), dan PBT. Gender Watch telah memperlihatkan arti penting kepemimpinan dan partisipasi perempuan miskin sebagai kunci untuk dapat mengakses dan menikmati manfaat program perlindungan sosial dan hak asasi perempuan.

“Strategi Gender Watch adalah menumbuhkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan miskin dalam memantau program-program perlindungan sosial. Hasil pemantauan didorong untuk masuk dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan dan penganggaran. Sehingga perempuan

dan masyarakat miskin dapat mengakses beragam program perlindungan sosial, layanan dasar, penguatan kepemimpinan, peningkatan keahlian dan pendapatan. Pada akhirnya ada peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan miskin dan kelompok marginal khususnya di wilayah program”, ungkap Misiyah, Direktur KAPAL Perempuan dalam pembukaan festival.

Pada tanggal 28 Agustus 2020, KAPAL Perempuan bersama mitra kerjanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban publik atas terlaksananya program Gender Watch 2013-2020 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Acara dibuka oleh Ibu Woro Srihastuti Sulistyoningrum, ST, MIDS, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas yang mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

“Kami berterima kasih, sudah banyak sekali program strategis yang dilakukan KAPAL Perempuan untuk meningkatkan peran, partisipasi dan kontrol perempuan dalam program penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial sehingga perempuan turut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Indonesia.”



Peluncuran Buku Daya Perempuan Akar Rumput

Pada tanggal 29 Agustus 2020, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si meluncurkan sebuah buku karya KAPAL Perempuan berjudul “Daya Perempuan Akar Rumput: Kepemimpinan Perempuan untuk Perubahan” sembari menyampaikan pidato kunci.

“Mari terus bersinergi dan menghimpun dukungan untuk mewujudkan kesetaraan gender, kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.” Menteri PPPA berpesan dalam pidatonya.

Implementasi Gender Watch menghadapi beragam tantangan seperti menguatnya konservatisme penafsiran agama, norma-norma adat yang mengungkung perempuan, dinamika politik pemerintahan hingga bencana alam. KAPAL Perempuan juga sampaikan pembelajaran dalam menembus tantangan

tersebut untuk menjadi referensi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hasil program ini telah memberikan kontribusi pada tumbuhnya gerakan perempuan di akar rumput, adanya keterbukaan pemerintah untuk bekerja sama dan menerima masukan dari perempuan miskin dengan menerbitkan kebijakan dan anggaran yang responsif gender dan pro rakyat miskin.



Mitra MAMPU Tampilkan 10 Tokoh Perempuan Akar Rumput lewat Tagar #MajuPemimpinPEREMPUAN



Masih berangkat dari semangat yang sama untuk memajukan kepemimpinan perempuan, MAMPU bersama mitranya, Institut KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Yayasan Pekka mengajak lebih banyak perempuan Indonesia berkarya dan menguatkan kepemimpinan perempuan melalui kampanye di media sosial dengan tagar #MajuPemimpinPEREMPUAN yang digunakan pada akun media sosial Facebook "Maju Pemimpin Perempuan" dan Instagram @MajuPemimpinPerempuan.

Mitra MAMPU Adakan Seri Pelatihan Penguatan Anggota Legislatif Perempuan

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), yang merupakan mitra MAMPU dalam agenda penguatan kapasitas perempuan anggota legislatif, melakukan rangkaian kegiatan terpadu melalui diskusi virtual yang dimulai pada 24 Juni hingga 26 Agustus 2020 lalu. Diskusi ini melibatkan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan anggota legislatif yang ada di 8 provinsi yaitu: Sulawesi Selatan, Bengkulu, Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun kolaborasi antara organisasi perempuan dengan perempuan anggota parlemen di tingkat pusat maupun daerah, dengan diawali proses assessment bersama untuk mengetahui kebutuhan penguatan kapasitas perempuan parlemen.

Beragam acara dilaksanakan seperti menyusun strategi pengelolaan reses partisipatif di masa pandemi. Salah satu

Selain Facebook dan Instagram, berbagai kelas diselenggarakan melalui Whatsapp serta webinar Zoom. Kegiatan ini turut menghadirkan para ahli dan pegiat dari berbagai bidang. Kelas-kelas ini mengajarkan berbagai topik seperti keamanan digital dan kekerasan berbasis gender online (KBGO), literasi keuangan, hingga kelas bercocok tanam untuk pengembangan kebun keluarga.

"Kepemimpinan perempuan tidak hanya menjadi penting dalam upaya mendorong kesetaraan gender di tatanan masyarakat Indonesia, tetapi juga membuka lebih banyak akses bagi seluruh perempuan Indonesia hingga mereka dapat menciptakan perubahan tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi bagi sesama perempuan dan masyarakat di sekitarnya, bahkan dalam proses pembuatan kebijakan," ungkap Kate Shanahan, Team Leader Program MAMPU dalam salah satu sesi pembukaan kelas. Ia menambahkan kampanye digital yang diinisiasi oleh 3 mitra MAMPU untuk agenda Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Prinsip Toleran ini diharapkan dapat mengamplifikasi kerja para perempuan akar rumput selama terlibat dengan Program MAMPU. "Melalui kampanye digital #MajuPemimpinPEREMPUAN, perjalanan dan hasil perjuangan para perempuan akar rumput dirangkum dan diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak #PerempuanMAMPU di luar sana untuk terus bersama-sama melanjutkan perjuangan dan bahu-membahu menciptakan perubahan demi perubahan di sekitarnya," pungkas Kate.

Kampanye #MajuPemimpinPEREMPUAN berlangsung sepanjang Agustus – September 2020. Dalam pelaksanaannya, kampanye ini melibatkan secara langsung 10 tokoh perempuan akar rumput yang telah menunjukkan dedikasinya terhadap gerakan perempuan dengan mendorong keterjangkauan akses layanan penting bagi perempuan dan mendorong kesetaraan gender di lingkungan mereka.



kegiatan ini juga merupakan ajang untuk mempromosikan champion perempuan anggota legislatif dengan berbagi pengalaman baik untuk mendorong kebijakan adil gender di daerah masing-masing.

Selain itu, mitra MAMPU ini juga bekerja secara kolektif mengadvokasi metode reses partisipatif melalui penyerahan kertas kebijakan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPI sebagai mitra MAMPU merasakan dampak dari advokasi reses partisipatif ini, tidak hanya bagi anggota DPRD tetapi juga konstituen karena munculnya ruang pertemuan kelompok yang beragam. Keragaman konstituen dapat memberikan gambaran dan informasi yang beragam misalnya dari dan tentang kelompok yang aksesnya terbatas seperti perempuan, anak, masyarakat miskin dan minoritas.



Pekerja Rumahan Dampingan Mitra MAMPU Menerima Bantuan Tenaga Kerja Mandiri dari Kemenaker



pekerja perempuan menjadi seorang wirausahawan,” jelas Ida Fauziyah pada acara serah terima tersebut.

Sebanyak 19 dari 168 kelompok yang menerima manfaat dari program ini adalah kelompok usaha mandiri (koperasi) pekerja

rumahan dampingan mitra MAMPU yakni Trade Union Rights Center (TURC) dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti). Mereka mendapatkan bantuan permodalan dari program TKM sebesar Rp 40 juta per kelompok.

“Pemberdayaan wirausaha baru TKM bertujuan untuk merangsang industri kecil, khususnya pekerja perempuan dengan meningkatkan kreativitas mereka. Menurut catatan kami, hingga 31 Juli 2020, terdapat total 3,5 juta pekerja formal dan informal yang terdampak pandemi. Maka ini perlu diperhatikan agar mereka mampu bangkit kembali dengan adanya program ini,” jelas Ida Fauziyah.

Perwakilan kelompok Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) dampingan Mitra MAMPU, menerima bantuan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Bagi Perempuan Pekerja Terdampak Covid-19 pada Kamis, 13 Agustus 2020 yang lalu di Purwakarta, Jawa Barat. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, didampingi oleh Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

“Pemerintah akan terus berupaya menekan pengangguran seminimal mungkin dengan program penanganan COVID-19, khususnya pekerja perempuan yang terkena PHK dan dirumahkan. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mengembangkan

Nantinya paket bantuan ini akan dimanfaatkan sebagai modal usaha koperasi pekerja rumahan yang sudah didirikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja rumahan dalam membangun usaha kelompok dan menopang perekonomian para pekerja rumahan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan JPRI Tangerang sekaligus menyerahkan Draft Usulan Rapermenaker Perlindungan Pekerja Rumahan dan berbagai buku serta kajian yg telah dihasilkan oleh mitra MAMPU, langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan.



Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.